

ABSTRAK

Penegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil oleh Pemerintah Kabupaten Demak masih lemah, hal ini dapat dibuktikan dari 3 (tiga) sudut pandang yaitu : Pegawai Negeri Sipil (Sasaran Kebijakan), Pejabat Struktural (Pemberi Kebijakan) dan Masyarakat Luas sebagai Tim Penilai. Banyaknya pelanggaran-pelanggaran menunjukkan belum optimalnya implementasi terhadap peraturan dan kebijakan terhadap Undang-Undang/Peraturan Pemerintah yang berlaku dilingkungan ini. Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ **Pemberian Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Dalam Rangka Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik / Good Governance di Pemerintah Kabupaten Demak**”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemberian hukuman/sanksi terhadap pelanggaran kasus disiplin pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak. Metode penelitian dengan *Socio Legal-Research* yang dipakai adalah metode kualitatif, di sini menekankan pada metode wawancara *Purposive Non Random Sampling*. Informan yang ditunjuk mewakili Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan disiplin pelanggaran, Pegawai Negeri Sipil lain, Pembuat Kebijakan yaitu para pejabat struktural dan masyarakat di sekitarnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum proses pemberian sanksi/hukuman disiplin pegawai negeri di Pemerintah Kabupaten Demak boleh dikatakan baik dan sudah ada kesesuaian dengan peraturan yang ada/diterapkan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, meskipun dijumpai para pejabat yang berwenang menilai masih menerapkan rasa toleransi terhadap pegawai tersebut, namun juga menimbulkan dampak positif diantaranya adanya efek jera untuk tidak mengulangnya baik pelanggaran yang sama atau satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya baik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau yang lain.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, meskipun di lapangan mengalami kendala, tetapi kendala sudah dapat diantisipasi dan ditangani dengan baik. Prinsip *good governance* telah dilaksanakan dalam pemberian hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Demak antara lain: Responsif, kepastian hukum, efektif efisien dan partisipasi.

Kata kunci : pemberian hukuman disiplin, pegawai negeri sipil, PP nomor 53 tahun 2010, *good governance*.

ABSTRACT

Enforcement of discipline Pegawai Negeri Civil by the Government of the District of Demak still weak , regard it can be proven from 3 (three) angle of view , namely : Employees of State Civil (Target Policy), officials Struktural (Employer Policies) and Masyarakat area as Tim Assessor . The number of violations shows yet optimal implementation of the regulation and to kebijakan of the Act / Regulations Government of the prevailing environment of this . Based on the terms mentioned in the above authors are interested to conduct research with title " **Giving Punishment Discipline Employees of State Civil According to Regulation Government Number 53 Year 2010 In the framework of Delivering Governance Governance The Good / Good Governance in Government Karesideng Demak** " .

This study aims to analyze the process of providing penalties / sanctions for violations of employee discipline cases within the Demak Regency Government . The method of research with *Socio-Legal Research* that is used is a method of qualitative , in here emphasizes on the methods interview *purposive non-random sampling* . Informants who appointed mewakili i Pegawai Negeri Civil are getting disciplined pelanggaran , Employees State Civil else , Author policy that is the official structural and communities in the vicinity .

Results of the study showed that in general the process of awarding penalties / punishment discipline employees state in the Government District Demak be said to be good and already there is conformity with the rules that there is / are applied , namely Rule Government of Number 53 Year 2010, though found the officials who authorized judge still apply a sense of tolerance against employees such , but also give rise to impact positively include the effect deterrent to not repeat either breach the same or one level is higher than before either Pegawai Negeri Civil are concerned or the other.

Results The study showed that pelanggaran discipline Employees of State Civil 've accordance Rule Government of Number 53 Year 2010 , though in a field experiencing obstacles, but obstacles have been able to diantisipasi -faced and dealt with well . Prinsip *good governance* has been implemented in awarding punishment discipline Employees of State Civil in Government District Demak among others : Responsif , certainty hukum , effective efficient and participation .

Keywords : giving punishment discipline , an employee of domestic civil , PP number 53 year 2010 , *good governance*.